

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dibab IV sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) maka dapat ditentukan sektor - sektor yang merupakan sektor basis dan non basis pada Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2021 adalah tujuh sektor ekonomi yang termasuk sektor basis yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sektor non basis pada Kabupaten Tulungagung terdapat sepuluh sektor yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa Lainnya.
2. Dari hasil analisis rata rata *Shift Share Potential Regional* (PR) pada Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 2013 hingga 2021 terdapat

delapan sektor yang mendorong sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur diantaranya sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

3. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen pada Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2021 memiliki delapan sektor maju yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa Lainnya.
4. Dari hasil analisis regresi linier berganda pada Kabupaten Tulungagung melalui perhitungan statistik menjelaskan bahwa sektor basis dan sektor non basis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka nilai pada sektor basis dan non basis juga meningkat dan sebaliknya. Aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder artinya tergantung pada perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh.

## 5.2 Saran

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga instansi-insntansi yang terkait harus lebih peka terhadap potensis-potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Perencanaan pembangunan suatu daerah sangatlah penting, sehingga perlu memperhatikan potensi-potensi unggulan di masing-masing daerah. Karena, bahwasanya setiap daerah pasti memiliki potensi-potensi unggulan yang belum dapat dikembangkan dengan baik. Selain itu, untuk sektor yang memberikan kontribusi kecil kepada perkembangan PDRB di Provinsi Jawa Timur hendaknya pemerintah dapat memaksimalkan dan mengoptilmalkan seluruh potensi-potensi yang ada.

Kemudian untuk pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi agar nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Sehingga, sektor-sektor ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Keseimbangan antar sektor juga menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kolaborasi antar sektor agar tercipta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sinergis dan dinamis. Hal tersebut akan memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi karena akan memunculkan minat investor yang nantinya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dan terciptanya efisiensi produk melalui kerjasama pihak pemerintah dengan swasta untuk mengelola sumber daya yang dimiliki di masing- masing daerah.